



HUMAS POLRI MENJADI WAHANA PENCERAHAN, PENYADARAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL DALAM RANGKA MEMBANGUN OPINI POSITIF

Humas Polri bisa menjadi wahana pencerahan, kesadaran internal maupun eksternal untuk membangun opini positif dan mampu memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan sosial dan keamanan serta mengapresiasi hukum yang terus dikritisi dalam upaya penegakan hukumnya yang lebih baik, demikian bagian dari amanat Kapolri dalam acara pembukaan Rakernis Divhumas Polri tahun 2006 yang diselenggarakan selama dua hari dari tanggal 8 s/d 9 Agustus 2006 bertempat di Gedung Rupattama Mabes Polri yang dihadiri oleh Wakapolri, Irwasum Polri, Pejabat Utama Mabes Polri dan para peserta Rakernis Humas Polri.

Lebih jauh Kapolri dalam amanatnya menekankan agar Humas Polri dan seluruh jajarannya, sampai di tingkat kewilayahan dapat menemukan solusi efektif dan efisien, setidaknya dari pengalaman 8 tahun era reformasi. Dapat membaca situasi sosial, memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan sosial dan keamanan, bukan hanya masalah Kepolisian saja tetapi juga kesadaran tentang implementasi nasionalisme, ideologi Bangsa dan Negara.

Dalam acara Rakernis tersebut, menurut Kapolri, akan mengkaji apa yang telah dilakukan oleh Humas Polri selama ini, sebagai upaya meningkatkan kinerjanya baik stra-

tegi, taktis, teknis maupun struktur organisasinya dalam menjawab perkembangan spektrum ancaman dan peta tantangan ke depan yang terus meningkat dewasa ini. Untuk itu, Kapolri meminta Kadivhumas Polri dan jajarannya segera mengantisipasi dan mengambil langkah implementatif, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Humas Polri dan melaksanakan pembinaan fungsi (Binfung) kehumasan ke daerah-daerah, hingga tingkat Polres. Perlunya Binfung Humas kepolisian di daerah-daerah, kata Kapolri, karena masih banyak pihak yang belum memahami perbedaan Humas dengan Dinas Penerangan (Dispen). "Humas Polri bukan sekedar berperan sebagai juru penerang, namun juga sebagai motivator, mediator dan fasilitator dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara Polri dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat luas," ucap Kapolri.

Karena berat tugas Humas Polri ke depan, diingatkan perlunya keterbukaan informasi sebagai hak publik yang harus dilayani, maka perlu didukung oleh penguasaan ilmu kehumasan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, anggaran yang mendukung dan struktur organisasi yang tepat dengan tuntutan tugas Humas Polri.

Seiring dengan meningkatnya daya kritis masyarakat serta tuntutan untuk memberikan klarifikasi

terhadap berbagai masalah yang makin kompleks, pengembalian fungsi Humas di tingkat Polres merupakan kelengkapan organisasi yang harus dikelola secara profesional, tidak bisa lagi "dirangkap" oleh pengembalian fungsi lain.

Dikemukakan pula, di abad informasi, peran Humas semakin penting. Karena Polri telah menempatkan lembaga kehumasan dalam struktur organisasinya, sejak kelahiran Polri tahun 1945. Kemudian diikuti instansi-instansi lain baik pemerintah maupun swasta. Dalam konteks Humas sebagai proses terus menerus, dari upaya manajemen, untuk memperoleh kepercayaan dan pengertian dari publik internal dan eksternal. Karena penting peran Humas dalam suatu organisasi, sehingga dekat dengan pembuat keputusan. Polri sebagai institusi besar, bahkan pelopor kehumasan di Indonesia, sudah sejak lama memposisikan Humas yang saat itu bernama Dinas Penerangan (Dispen), langsung dekat pimpinan puncak yang kemudian menjadi Humas dan semakin dikembangkan peran, fungsi, tugas dan struktur organisasinya, agar mampu menjawab tantangan-tantangan tugas Polri ke depan yang sangat kompleks.

Sejalan dengan peran penting lembaga kehumasan tersebut, dimasukan dalam manajemen modern, bahkan dalam strategi perang modern, dalam memenangkan

peperangan. Bahwa berbagai masalah dalam upaya penyelesaiannya, tidak bisa didekati dari satu sisi saja. Sebagai contoh, kasus korupsi, *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing*, narkoba dan lain-lain, tidak bisa diselesaikan secara parsial dari segi hukum saja, karena permasalahan ini sudah berakar dalam struktur sosial masyarakat, yang penyelesaiannya harus dilakukan secara konseptual dan komprehensif. "Pada kondisi seperti ini peran kehumasan sangat penting karena melalui kehumasan yang efektif, permasalahan akan dapat dilihat secara multidimensi dan multi pendekatan," papar Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri menekankan, peran Humas dalam ikut memerangi kejahatan. Keberhasilan tugas Humas terletak pada kemampuan dalam merumuskan strategi, dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, melibatkan berbagai ahli dan mengajak semua instansi. Ketepatan dalam menyusun strategi inilah, yang harus diperhatikan oleh pengemban fungsi Humas di tingkat Markas Besar Kepolisian maupun kewilayahan. Strategi ini sangat penting, kata Kapolri, apalagi saat kemampuan negara terus dipertanyakan di banyak sektor, sementara di lingkungan sosial yang sedang berubah, belum sepenuhnya terlayani oleh aparat-aparat pelaksananya. "Yang terjadi adalah meningkatnya tuntutan masyarakat, tetapi tidak diimbangi secara memadai oleh kemampuan Negara," kata Kapolri.

Dari kondisi seperti itu, Kapolri berharap Humas Polri menjadi wahana pencerahan, penyadaran internal maupun eksternal dalam rangka membangun opini positif, terutama di saat eforia masyarakat ke arah nilai baru terus berlanjut, yang prosesnya terkadang menghentakkan bangunan struktur yang sudah mapan. Ini dilema yang lazim terjadi dalam reformasi sosial. Di satu sisi kita berhasil membimbing kepatuhan umum, tetapi di saat yang bersamaan, justru berjalan tanpa kendali karena struktur baru yang kurang siap.

Hal ini berimplikasi mulai dari ketidakpuasan masyarakat, hingga terjadinya konflik-konflik, yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

Kontribusi lain dari Humas, lanjut Kapolri, menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengapresiasi hukum di tengah situasi Negara yang

terus dikritisi dalam upaya penegakan hukumnya yang seringkali dinilai buruk. Kritik ini, tentu sangat mempengaruhi citra Polri, karena Polri adalah pendekar hukum terdepan. "Humas Polri harus dapat membuat formula baru, dalam membentuk net work yang kuat dengan seluruh lembaga pemerintah, maupun non pemerintah dan masyarakat luas, guna memacu kinerja Polri," imbau Kapolri.

Hal lain yang harus dicermati, Kapolri menambahkan adalah faktor korelatif kriminogen, karena kita menyadari bahwa gangguan Kamtibmas tidak berakar pada satu faktor, tetapi multi faktor. Menghadapi perkembangan seperti itu, kita semua telah memahami bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memerlukan kerjasama intra dan antar institusi secara konseptual, terpadu dan saling menghargai. ***



Kapolri Lantik 698 Perwira Baru

PADA hari Selasa tanggal 26 September 2006 Kapolri melantik 698 Perwira lulusan reguler XXXIII dan menutup pendidikan pembentukan Perwira Polri Reguler T.A. 2006 di Secapa Sukabumi Bogor. Selanjutnya para perwira baru ini akan ditugaskan dan ditempatkan ke kesatuan-kesatuan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dari 698 Perwira Baru terdapat tiga Perwira yang menyandang predikat terbaik yaitu 1. Predikat Tertabah disandang oleh IPDA Imam Syafi'i SH asal Polda Metrojaya. 2. Predikat Cendekia disandang oleh IPDA Sri Budhi Setyaningsih asal Polda Metrojaya. 3. Predikat Trengginas disandang oleh IPDA Zainuddin asal Polda Metrojaya. Sebenarnya Pendidikan Pembentukan Perwira Polri Reguler T.A. 2006 diikuti oleh 700 orang, tetapi ada dua orang tidak dilantik karena bermasalah. Satu orang meninggal dunia karena sakit an. Supatno asal Polda Jabar dan satu orang dikeluarkan dari pendidikan karena Mental (Asusila) an. Hendry Berthon Lumban Tobing asal Polda Jambi.

Pada sambutannya Kapolri menegaskan "Para Perwira harus mampu mengembangkan kinerja operasional yang lebih dinamis, variatif, inovatif dan terus berkembang. Selain itu para Perwira harus mampu menjabarkan setiap kebijaksanaan Pimpinan agar mudah dipahami oleh anggotanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan sikap dan perilaku Para Perwira dalam memimpin membimbing dan mengawasi Pelaksana tugas anggota di lapangan harus senantiasa dapat diwujudkan serta terjaga eksistensinya."

Setelah melantik dan menutup pendidikan pembentukan Perwira Polri Reguler T.A. 2006 di Secapa Sukabumi Bogor, Kapolri langsung kembali ke Mabes Polri melalui darat dan pelaksanaan berjalan lancar dan aman. ***

Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Secara Nasional

BAHAYA penyalahgunaan Narkoba yang berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis Narkoba harus di tanggulang. Hal ini disebabkan karena dampak yang di timbulkan sebagai akibat penyalahgunanya akan merusak mental dan fisik bagi individu yang bersangkutan dan dapat meningkatkan terhadap hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Akhir-akhir ini, kejahatan Narkoba di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan telah berada pada ambang yang mengkhawatirkan, oleh karena itu perlu segera ditanggulang. Demikian antara lain sambutan Kepala Pelaksana Harian BNN Drs. Made Mangku Pastika acara pemusnahan Barang Bukti Narkoba secara Nasional di Puspitek, Serpong, Tangerang Juni 2006 lalu.

Data kejahatan yang dihimpun Badan Narkotika Nasional dari Instansi terkait, khususnya Instansi penegak hukum selama 5 Tahun terakhir ini, terdapat trend perkembangan yang cukup tajam dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah perkara / Kasus

Tahun 2001 - 2002 dari 3.617 menjadi 3.751 bertambah 134 kasus atau naik 3.70 %, tahun 2002 - 2003 dari 3.751 kasus menjadi 7.140 bertambah 3.389 kasus atau naik 90.3 %, tahun 2003 - 2004 dari 7.140 menjadi 8.401, bertambah 1.261 kasus atau naik 17,6%, tahun 2004 - 2005 dari 8.401 menjadi 16.252, bertambah 7.851 kasus atau naik 93,45%

Jumlah Pelaku/ tersangka

Tahun 2001 - 2002 dari 4.924



tersangka menjadi 5.310 tersangka bertambah 386 tersangka atau naik 7,83 %, tahun 2002 - 2003 dari 5.310 tersangka menjadi 9.717 tersangka bertambah 4.407 tersangka atau naik 82,99 %, tahun 2003 - 2004 dari 9.717 tersangka menjadi 11.323 tersangka bertambah 4.407 tersangka atau naik 82,99 %, tahun 2004 - 2005 dari 8.401 menjadi 16.252, bertambah 7.851 kasus atau naik 93,45 %

Jumlah barang bukti Narkoba

Barang bukti Narkoba yang disita sejak tahun 2000 s/d 2004 secara umum terdapat turun naik bila dilihat dari jenisnya. Namun demikian hal menonjol yang perlu mendapat perhatian khusus adalah barang bukti hasil sitaan psikotropika.

Jenis ekstasi pengungkapan clandestine lab yang trend perkembangannya cukup tajam sebagai berikut :

Tahun 2001 - 2002 dari 90.523 butir menjadi 84.225 butir atau turun 6,95 %, tahun 2002 - 2003 dari 84.225 butir menjadi 205.675

butir atau naik 114,2 %, tahun 2003 - 2004 dari 205.675 butir menjadi 251.078 butir atau naik 22 %, tahun 2004 - 2005 dari 251.078 butir menjadi 255.016 butir atau naik 1,56 %

Di samping barang bukti ekstasi, dalam tiga tahun terakhir ini telah diungkap 3 (tiga) pabrik besar ekstasi/ clandestine laboratory yaitu di Bogor, Cikande Serang dan Batu Malang Jatim, dimana salah satunya merupakan terbesar ketiga di dunia.

Thema pemusnahan barang bukti yaitu **"MUSNAHKAN BARANG BUKTI NARKOBA AGAR ANAK CUCU KITA TERHINDAR DARI KEHANCURAN"**

Thema ini mengandung arti sebagai berikut :

1. Kegiatan pemusnahan barang bukti Narkoba pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pada tingkat peradilan memang telah dimandatkan dalam Undang-Undang baik KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang

psikotropika dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang narkotika. Untuk itu kepada aparat penegak hukum (Criminal Justice System/CJS) agar tidak ragu-ragu melaksanakan pemusnahan seperti ini.

2. Upacara ini dimaksudkan, sebagai keterbukaan aparat/CJS kepada masyarakat luas untuk menjelaskan bahwa setiap barang bukti Narkoba yang disita, ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat yang berwenang, selalu dimusnahkan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
3. Sebagai salah satu realisasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Nasional yang menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti Narkoba secepatnya, adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia termasuk guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara.
4. Sebagai ajakan kepada semua elemen masyarakat dan pemerintah "marilah bersama-sama kita tingkatkan upaya dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba agar anak cucu kita terhindari dari kehancuran melalui : pemusnahan barang bukti Narkoba secepatnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Waktu pelaksanaan pelaksanaan pemusnahan barang bukti dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2006, pukul 10.00 WIB (Pemusnahan pada tingkat pusat) di Pustek Serpong Tangerang, untuk tingkat daerah (tingkat propinsi) ditentukan oleh BND/BNP masing-masing propinsi,

setelah dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (CJS) setempat, dalam bulan Juni dan Juli 2006.

Pelaksana untuk tingkat pusat dilaksanakan oleh unsur Criminal Justice System (CJS), Polri, Kejaksaan dan instansi terkait dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya, dengan dikoordinir oleh Badan Narkotika Nasional sedangkan untuk tingkat daerah/propinsi dilaksanakan oleh unsur Criminal Justice System (CJS) propinsi dan tingkat II, dengan dikoordinir oleh Badan Narkotika Propinsi setempat.

Jumlah barang bukti narkoba yang dimusnahkan sebagai berikut :

a. Pada tingkat pusat

Barang bukti narkoba yang dimusnahkan pada tingkat pusat berasal dari penyidik Bareskrim Polri CQ, Direktorat IV/TP, Narkoba dan KT dan dari penyidik Polda Metro Jaya dan jajarannya sebagai berikut :

- 1) Dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT, Ekstasi 1.375 butir
- 2) Dari Polda Metro Jaya : Ganja 246.051 kg, Heroin 527.147 gr, Ekstasi 64.578,5 butir, Shabu, 1.542,94 gr, Daftar G 391 btr, Bahan baku ecstasy 40.849 gr
- 3) Dari Polda Nangroe Aceh Darussalam

a) Hasil operasi pemusnahan ladang ganja di Kab. Gayo luas dan Aceh Tenggara, dan telah dimusnahkan pada tanggal 20 Pebruari 2006 oleh Kalakhar BNN sebanyak 125.000 batang pohon ganja dan 127.000 bibit pohon ganja seberat 31.250 ton.

b) Hasil operasi pemusnahan lading ganja di Kab. Bireun dan Aceh Besar, dan telah dimusnahkan pada tanggal 25 Mei 2006 oleh Kalakhar BNN sebanyak 14.369 batang pohon ganja seberat 12.930 ton dan dimusnahkan di TKP sebanyak

60.120 batang pohon ganja seberat 9.946 ton

- 4) Rincian secara keseluruhan barang bukti Narkoba baik jenis narkotika maupun jenis psikotropika yang dimusnahkan pada tingkat pusat adalah a. Jenis narkotika : Ganja : 4.372,051 kg, Heroin 527,147 gr, b. Jenis psikotropika : Ekstasi 65.953,5 btr, Shabu 1.542,94 gr, Daftar G 391 btr. Bahan baku ecstasy 40.849.
- 5) Kalkulasi jumlah harga dari barang bukti Narkoba yang dimusnahkan sebesar kurang lebih Rp. 225,287 milyar
- 6) Perkiraan jumlah seluruh penduduk yang dapat diselamatkan menjadi pecandu pemula dari barang bukti yang dimusnahkan adalah 62.595.567 orang

b. Pada tingkat daerah/propinsi

Barang bukti Narkoba yang dimusnahkan pada tingkat daerah/propinsi berhasil dari penyidik Polda Jabar, Jateng, Kaltim, Kalteng, Lampung dan Sulsel beserta jajaran jumlahnya sebagai berikut : Ganja 133.771,101 gr, Heroin/putaw 17,14 gr, Ekstasi 2.288 butir, Shabu 1.755,498 gr, Daftar G 103.781 butir, Pohon ganja 226 batang, Kalkulasi jumlah harga grosir dari barang bukti narkoba yang dimusnahkan sebesar kurang lebih Rp. 335,632 milyar, Perkiraan jumlah seluruh penduduk yang dapat diselamatkan menjadi pecandu pemula dari barang bukti yang dimusnahkan adalah 192.413 orang.

Pemusnahan barang bukti Narkoba pada tingkat pusat akan dijadikan contoh pelaksanaan pemusnahan barang bukti Narkoba pada tingkat Propinsi/Polda dengan penekanan waktu pemusnahan dalam rangka memperingati Hari Internasional melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tahun 2006, adalah bulan Juni 2005.***

Struktural, Organisasional Dan Kultur, Polri Telah Melakukan Reformasi yang Diarahkan Pada Sosok Polri yang Bermoral, Professional Dan Modern

NAFAS reformasi di Republik Indonesia yang kita cintai ini, memberikan dorongan bagi Polri untuk terus berupaya mereformasi diri, mewujudkan perannya seperti yang diharapkan oleh masyarakat yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum, yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan transparansi.

Oleh karena itu Polri baik struktural, organisasional dan kultur, antara lain, telah melakukan langkah-langkah reformasi yang diarahkan pada sosok Polri yang bermoral, profesional dan modern, dengan pola strategi yang menekankan pada kedekatan hubungan Polisi dan masyarakat, dalam kerangka konsep Perpolisian masyarakat, untuk mampu menyelesaikan permasalahan gangguan Kamtibmas yang terjadi, tetapi benar-benar diarahkan pada tataran penyelesaian akar permasalahan, demikian antara lain sambutan Kapolri pada acara pembukaan Pameran Lukisan dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-60 yang mengambil thema "**Polisi Mitra**

Masyarakat Dalam Refleksi Seni".

Pada kesempatan tersebut Kapolri Lebih jauh mengatakan bahwa Upaya reformasi seperti yang telah diuraikan di atas tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh Polri, berbagai masukan, dorongan dan sumbangan pikiran dari seluruh elemen masyarakat yang diperlukan, termasuk dari kalangan seniman lukis. Oleh

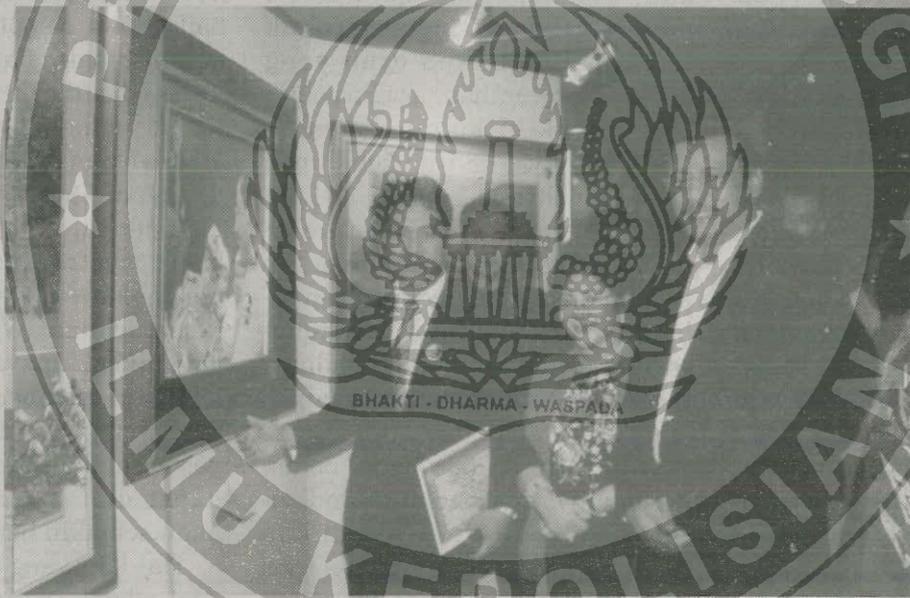
melangkah maju menyongsong hari depan yang lebih baik.

Selanjutnya atas masukan, dorongan dan sumbangan pikiran terhadap Polri yang diwujudkan dalam hari karya seni indah dari para seniman lukis ini, saya selaku pribadi dan pimpinan Polri menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan hasil karya imajinasi

dan goresan tangan-tangan terampil para seniman lukis ini dapat menjadi bagian koleksi para kolektor seni lukis, dan memiliki nilai tersendiri karena dapat mengingatkan pada momentum Hari Bhayangkara ke 60 Tahun 2006. Kemudian saya juga menyam-

paikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kolektor seni lukis dalam pameran ini.

Selain itu ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada panitia penyelenggara pameran lukisan ini. Semoga pameran lukisan Polri ini dapat terselenggara dengan baik dan Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kelancaran terhadap setiap langkah kita dalam mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia tercinta, Amin.***



karena itu saya menyambut baik dilaksanakannya pameran lukisan dalam rangka Hari Bhayangkara ke 60 Tahun 2006 ini. Yang mengambil Tema : "**Polisi Mitra Masyarakat Dalam Refleksi Seni**". Tema yang diangkat kali ini diharapkan dapat dijadikan cermin oleh Polri untuk merefleksi diri dengan melihat penilaian terhadap kinerja Polri selama 60 tahun oleh masyarakat dalam perspektif seni, sehingga mampu membuka cakrawala berfikir bagi Polri untuk terus mengabdikan diri

Polri Selaku Pelindung, Pengayom Dan Pelayan Masyarakat Serta Penegak Hukum, Sangat Berkepentingan Untuk Ikut Membina Dan Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

ENAM puluh satu yang lalu, para founding father bangsa Indonesia yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Titik tonggak perjalanan waktu sejarah dicanangkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan lepas dari segala belenggu penjajahan. Cita-cita luhurpun dirumuskan melalui lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan terlindungnya bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tercapai kesejahteraan umum dan cerdasnya kehidupan Bangsa, demikian antara lain sambutan Kapolri mengawali amanatnya pada acara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-61 yang dibacakan oleh Kabinkam Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Drs. Ismerda Lebang yang bertindak sebagai Inspektur Upacara (IRUP) bertempat di lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, yang diikuti para Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri di Lingkungan Mabes Polri.

Lebih jauh Kapolri mengatakan bahwa perjalanan kehidupan Bangsa, membuktikan proklamasi kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa untuk merengguk buah kemerdekaan, namun awal dari perjuangan panjang Bangsa Indonesia dalam mengisi kehidupan mencapai cita-cita luhur yang telah dicanangkan bersama. "Berbagai tantangan dan kendala selalu menghadang seiring dengan upaya keras pembangunan yang kita jalankan, terutama munculnya berbagai problematika Bangsa dengan berbagai dimensi

permasalahannya," paparnya.

Di bidang politik, lanjut Kapolri, dengan penerapan sistem pemerintahan maupun kebijakan keparitayan yang silih berganti, hampir selalu menimbulkan permasalahan instabilitas. Ada kalanya membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. "Namun sejak digulirkannya reformasi, iklim kehidupan politik telah menunjukkan arah yang benar dan kecerahan, sistem politik yang diyakini mampu mengantarkan rakyat ke arah kehidupan yang demokratis," ucapnya. Lalu bidang ekonomi, sistem perekonomian yang rentan terhadap pengaruh global, telah menyebabkan terpuruknya perekonomian nasional pada saat terjadinya krisis moneter beberapa tahun yang lalu.

Walaupun kini, kondisi belum sepenuhnya pulih, namun indikator perbaikan perekonomian kita telah menunjukkan sinyal-sinyal yang positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di bidang sosial budaya, bahwa kehidupan bangsa yang multi kultur, multi etnis dan multi agama, sebagai suatu kesatuan yang tersymbol dalam Bhineka Tunggal Ika.

Sepatutnya masih harus terus dibina dengan baik, sebab sepanjang sejarah kehidupan bangsa tercatat, berbagai gejolak dan upaya separatisme telah seringkali muncul dengan berbagai faktor penyebab dan setiap kali pula kita harus membayar dengan harga yang mahal untuk mengembalikan situasi ke arah yang kondusif.

Sedangkan di bidang keamanan dan hukum, menurut Sutanto, kondisi instabilitas yang seringkali muncul sebagai akibat terjadinya berbagai bentuk kejahatan dari yang konvensional sampai *transnational crime*, tindak terorisme peledakan bom, unjuk rasa yang anarkis, meluasnya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, yang secara langsung atau tidak langsung akan selalu memberikan dampak bagi terhambatnya upaya pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. "Kondisi tingkat kesadaran hukum yang cenderung rendah dari sebagian masyarakat kita, memberikan dampak signifikan bagi terhambatnya upaya penciptaan kondisi keamanan yang lebih baik," kata Kapolri meminta perhatian pihak jajarannya.

Kondisi dari aspek-aspek, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan hukum, apabila tidak ditangani dengan baik, tentu selalu menjadi tantangan dan kendala bagi upaya kita melangkah ke arah pencapaian cita-cita proklamasi kemerdekaan. Walaupun, berbagai langkah upaya yang telah kita lakukan, memberikan pula hasil-hasil yang positif dan beberapa permasalahan besar Bangsa telah dapat diatasi dengan baik dan akan semakin bertambah baik.

Hal lain yang kini masih dihadapi, adalah permasalahan GAM di Nanggroe Aceh Darussalam, dengan telah ditandatanganinya MOU Helsinki setahun yang lalu, yang diikuti dengan telah disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) beberapa waktu lalu, kita semua dan masyarakat Aceh optimis bahwa kondisi perdamaian yang menyeluruh dan lestari serta kehidupan yang semakin sejahtera akan bisa dicapai dengan baik. "Apalagi dengan segera digelarnya Pilkada bulan Desember mendatang. Yang mungkin timbul sebagai akibat belum tersosialisasinya dengan baik isi dan makna UU PA, mudah-mudahan tidak akan melunturkan semangat

damai yang telah terpatri dengan kokoh dalam jiwa dan sanubari masyarakat Aceh,” imbau Kapolri.

Menyinggung tindak terorisme, yang mewarnai kondisi keamanan negara kita, dengan meningkatnya DR. Azhari dan para pengikutnya serta beragam pelaku bom lainnya, seperti Bom Bali I, Bom Hotel Marriot, Bom Kuningan yang berhasil ditangkap aparat Kepolisian, telah menunjukkan gejala yang jauh menurun. Aktor pelaku teror Bom, Noordin M Top sampai saat ini masih belum tertangkap dan masih terus dikejar, tetapi kondisi yang jauh lebih kondusif telah tercipta dan terpelihara dengan baik. “Ini, tidaklah menjadikan kita puas dan langkah untuk terus berupaya menanggulangi dan memberantas tindak terorisme yang terjadi di seluruh wilayah Tanah Air,” tandasnya.

Hal lain yang disinggung Kapolri, perihal tingkat kesadaran hukum masyarakat dinilai belum memuaskan dalam tata kehidupan bernegara hukum karena memang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor penyebab. “Seperti tingkat kesejahteraan, pendidikan yang rendah, sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional, mentalitas masyarakat dan berbagai faktor lain juga menjadi pemicu bagi timbulnya masalah ini,” ucapnya. Keadaan ini diyakini akan semakin baik seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan

tingkat pendidikan masyarakat serta seiring pula dengan meningkatnya profesionalitas aparat penegak hukum.

Menguatnya tuntutan masyarakat bagi pemekaran wilayah dengan berbagai alasan pendukungnya, pengakomodiran tuntutan pemberlakuan ketentuan syariah di beberapa pemerintahan Kabupaten, tindakan-tindakan main hakim oleh kelompok Ormas dengan ukuran yang subyektif, tindakan korupsi yang masih merajalela, pembalakan liar dan pengrusakan lingkungan yang masih terjadi, penyalahgunaan Narkoba yang semakin meningkat jumlahnya dan lain-lain, adalah bagian dari permasalahan dewasa ini, yang memerlukan perhatian dan penanganan yang proporsional oleh segenap komponen Bangsa.

Dengan melihat berbagai kemajuan dan tantangan Bangsa dengan berbagai kompleksitas permasalahannya dalam menuju pencapaian cita-cita proklamasi kemerdekaan, Kapolri menekankan perlunya kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dalam kaitan ini semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, diyakini akan dapat mendorong dan mendinamisir berbagai upaya dan kerja keras kita semua. Semangat proklamasi, akan tetap aktual

untuk menjadi penggerak utama tumbuhnya motivasi bagi upaya mengatasi berbagai permasalahan Bangsa saat ini dan ke depan. “Dengan semangat proklamasi, persatuan dan kesatuan bangsa dapat diperkokoh, sebab menjadi modal dasar bagi setiap langkah upaya bangsa menuju Indonesia yang aman, adil, demokratis dan sejahtera,” katanya mengingatkan segenap jajaran Polri.

Sementara itu, Kapolri berharap Polri sebagai bagian dari aparat pemerintah dengan tugas utamanya selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sangat berkepentingan untuk ikut membina dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa yang diharapkan akan tercipta pula kondisi dan perasaan aman masyarakat. Berbagai strategi perpolisian terus dijalankan. Seperti *community policing*, untuk menumbuhkembangkan peranserta masyarakat dalam upaya-upaya pembinaan kamtibmas yang hakekatnya akan memupuk motivasi dan kemauan untuk rela berkorban, memupuk rasa senasib dan sepenanggungan dengan tujuan yang positif, menciptakan keamanan.

Penciptaan kondisi aman perlu pula ditunjang dengan berbagai kegiatan Kepolisian yang bersifat preventif untuk meniadakan terjadinya tindak pidana dan berbagai kegiatan Kepolisian yang bersifat represif melalui penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, tidak diskriminasi dan profesional, untuk menjamin rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum. Tegaknya hukum secara adil, salah satu unsur dari kehidupan demokrasi, selain pengakuan atas perbedaan pendapat dan lain-lain. Polri seharusnya merasa bangga karena mendapat kehormatan untuk menjalankan peran yang sangat signifikan dalam menegakkan demokrasi dalam kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia.***



Tinggalkan Pandangan Militeristik dan Hindari Pemberian Layanan Kepada Pimpinan yang Bersifat Berlebihan

REFORMASI Polri, yang mencakup aspek instrumental, struktural dan kultural, telah berjalan kurang lebih tujuh tahun. Berbagai langkah untuk mewujudkan tujuan reformasi Polri telah dilaksanakan dan tanda-tanda efektivitasnya telah mulai terlihat dan dirasakan hasilnya oleh kita semua. Polri yang dipercayakan untuk berdiri paling depan mengelola masalah keamanan telah membuktikan kemampuannya. Berbagai masalah besar bangsa hampir ditangani secara baik, mulai dari penanganan konflik dan pengamanan pemilu yang diikuti rangkaian Pilkada, sampai pada pengungkapan kasus-kasus menonjol baik berskala nasional maupun internasional.

Demikian amanat Kapolri pada upacara bulanan di Lapangan Upacara Bhayangkara yang dalam hal ini disampaikan oleh Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Kapolri mengatakan, keberhasilan dan prestasi-prestasi tersebut tidak lalu harus membuat kita membusungkan dada. Sebagaimana ditekankan oleh sejumlah pengamat kepolisian, keberhasilan demikian hanya menyangkut kasus dan peristiwa yang menarik perhatian publik, atau dikenal dengan sebutan *celebrity cases*. Kasus-kasus *celebrity cases* hanya berpotensi mengangkat atau menekan citra Polri secara drastis dan signifikan dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, yang justru bisa mengangkat nama baik Polri

secara langgeng adalah kinerjanya sehari-hari. Hasil berbagai penelitian serta ungkapan sejumlah pakar dan pemerhati Polri menunjukkan bahwa, walaupun telah



terlihat adanya kemajuan dalam banyak hal, seperti penindakan perjudian dan pungutan-pungutan liar dalam jajaran Polri, sikap dan perilaku sebagai anggota Polri masih saja menyimpan benih-benih ketidak-puasan warga, selain belum berhasilnya kita mengambil langkah-langkah penanggulangan penyalah-gunaan kekuasaan, baik yang menyangkut brutalitas maupun korupsi. Secara keseluruhan kondisi demikian tidak terlepas dari kinerja kita semua termasuk pada satuan-

satuan kerja di lingkungan Mabes Polri. Pada gilirannya kondisi demikian belum mampu mengeliminasi rasa tidak percaya masyarakat secara signifikan terhadap institusi Polri secara keseluruhan. Kita seringkali mengaitkan kondisi demikian dengan upaya reformasi kultural dalam tubuh Polri.

Reformasi kultural biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama, karena menyangkut perubahan sikap dan perilaku yang telah mentradisi dalam kehidupan bersama para anggota suatu organisasi; hal yang serupa juga berlaku bagi reformasi Polri. Karena itu, seperti halnya reformasi struktural dan instrumental, upaya reformasi kultural menuntut kemampuan manajerial yang optimal. Tetapi hasil pengamatan saya mengindikasikan bahwa pemahaman dan kesadaran akan reformasi khususnya reformasi kultural hanya berada pada level para pejabat Polri, atau katakanlah para Pamen ke atas, karena manajemen hanya dipahami sebagai kelompok para pejabat, atau orang-orang ber" pangkat".

Manajemen sebagaimana kita ketahui adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai hasil melalui kegiatan orang lain, mulai dari level puncak sampai pimpinan unit terkecil, yaitu siapa saja yang membawahi satu atau beberapa orang anggota. Biasanya kita menyebut mereka sebagai *first-line supervisor* atau penyelia lapangan atau bisa kita sebut sebagai atasan langsung yang paling dekat dengan para pelak-

sana pada lapis bawah. Tetapi acapkali kita beranggapan bahwa *first-line supervisor* adalah para Perwira Polri yang bertugas di Polres atau Polsek. *First-line supervisor* ada pada setiap bagian organisasi, pada Propam, Bareskrim, Logistik, Keuangan, dll. Di manapun anda bertugas pasti ada *first-line supervisor*. Hasil berbagai penelitian, termasuk yang dilakukan PPITK PTIK tahun 2002, mengungkapkan bahwa peranan atasan langsung sangat dominan bagi keberhasilan kinerja Polri. Mereka ternyata memainkan peranan yang sangat berarti dalam organisasi, sehingga karenanya dituntut untuk juga memiliki kemampuan manajerial terutama pengawasan.

Lebih Jauh Kapolri mengatakan bahwa Pengawasan sebagai bagian dari proses manajemen merujuk pada tindakan mengamati dan menilai (*oversee*) pelaksanaan tugas para pelaksana dengan mengacu pada ketentuan hukum, kebijakan pimpinan serta prinsip-prinsip dan aturan main yang berlaku. Tampilan kerja dan moral pekerja sangat lebih dipengaruhi oleh atasan langsung yang terdekat dari pada faktor-faktor lingkungan lainnya. Karena itu pengawasan level pertama atau terdepan memegang posisi kunci dalam setiap organisasi. Sementara bagaimanapun besar kemampuannya, pimpinan pada level puncak atau sekitarnya hanya akan beroperasi pada kondisi

si yang hampir vakum jika kepemimpinan yang arif tidak tersedia pada level operasional di mana pekerjaan sehari-hari dilaksanakan. Betapa pentingnya peranan Perwira Pertama, para Pegawai Negeri Sipil golongan III, Bintara bahkan Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil golongan II dan I. Diharapkan dapat menghasilkan produk dan jasa, tetapi sebagian lain ada yang bertanggung jawab menjamin agar setiap pekerjaan dilaksanakan secara berhasil dan berdaya guna. Para atasan langsung harus mengembangkan seni mempengaruhi orang lain, mengkoordinasikan upaya dan kegiatan serta mengarahkan bawahannya kepada tujuan yang tepat, sedemikian rupa agar para bawahan patuh, percaya diri, menghargai dan bekerjasama secara loyal.

Sebelum mengakhiri amanatnya Kapolri menyampaikan beberapa hal yang dapat membawa manfaat bagi upaya meningkatkan kinerja setiap satuan organisasi, yaitu antara lain :

Pertama, Tinggalkan pandangan militeristik yang melihat hubungan atasan-bawahan secara kaku sebagai hubungan struktural dan hirarkis, tetapi kembangkan hubungan fungsional dan kerjasama yang harmonis. Hindari pemberian tugas dengan cara yang lebih bersifat memerintah, melainkan dengan cara menggugah atau memotivasi sehingga tercipta suatu partisipasi yang tulus. Ciptakan atmosfir lingkungan kerja yang memungkinkan bawahan untuk berani mengemukakan pendapat yang berbeda.

Kedua, Hindari pemberian layanan kepada pimpinan yang bersifat berlebihan. Bawahan harus loyal kepada atasannya, tetapi bukan dalam pengertian yang sempit, bukan loyal untuk mencari muka di mata atasan, melainkan loyal pada misi organisasi.

Ketiga, Ada sebagian personel yang sejak pagi hingga sore sibuk menyelesaikan pekerjaan mereka, sementara sebagian lain bahkan

pagi-pagi mengisi waktunya dengan membaca koran atau mengobrol dan pada siang hari bergegas untuk segera meninggalkan kantor. Di lain pihak, ada karyawan atau satuan organisasi lain yang sedang menunggu produk atau jasa yang harus dihasilkan mereka; akibatnya pekerjaan menjadi tertunda, bukan saja yang menyangkut tugas suatu satuan organisasi tetapi juga bahkan produk atau jasa organisasi dalam skope yang lebih besar. Saya mengharapkan personel sekalian agar sebelum masuk kantor sudah menyiapkan diri tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan, baik sisa pekerjaan hari sebelumnya atau pekerjaan baru. Dalam konteks reformasi kultural kita harus berani melakukan tinjauan (*review*) dan mengembangkan daya kreatif yang positif, sehingga kita mengerjakan sesuatu yang memang perlu kita lakukan.

Keempat, Membiasakan diri menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah untuk jangka waktu seminggu atau untuk hari esok. Adakan pembagian tugas dengan bawahan dan tentukan kapan suatu pekerjaan harus diselesaikan. Hindari sikap yang cenderung menyenangkan laporan yang ABS (Asal Bapak Senang); sekali-sekali atasan perlu melakukan pengamatan langsung atau "*Cross-Check*" atas pekerjaan bawahan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, salah satu kelemahan yang acapkali kita tunjukkan adalah keengganan untuk memberikan teguran terhadap hal-hal yang salah, bahkan ada kecenderungan kita untuk mentolerir kesalahan hanya karena enggan, atau lebih parah lagi karena kebiasaan. Membiarkan kebiasaan mentolerir kesalahan bawahan atau teman merupakan virus yang mengkroposi suatu organisasi yang pada gilirannya membuat upaya reformasi kultural yang jauh dari sasaran. Memberi teguran tidak selalu harus berarti menyalahkan tetapi juga memberi direktif. ***

Tinggalkan pandangan militeristik yang melihat hubungan atasan-bawahan secara kaku sebagai hubungan struktural dan hirarkis, tetapi kembangkan hubungan fungsional dan kerjasama yang harmonis.

Penanda Tangan Nota Kesepakatan antara Polri dengan Badan Meteorologi dan Geofisika

PADA hari Jum'at 1 September 2006 telah ditanda tangani Nota Kesepahaman antara POLRI dan BMG tentang Informasi dan Peringatan Dini Bencana Alam Meteorologi dan Geofisika. Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun kerjasama antara POLRI dan BMG dalam melakukan sinergitas/keterpaduan dan percepatan pelaksanaan penyebaran informasi dan peringatan dini bencana alam meteorologi dan geofisika. Sedangkan sasaran dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari bencana alam meteorologi dan geofisika, sehingga dapat meminimalisir baik korban manusia maupun kerugian harta benda. Ruang lingkup dari Nota Kesepakatan ini meliputi : pemberian dan penyebaran informasi cuaca dan iklim berpotensi bencana, informasi gempa bumi, dan peringatan dini tsunami.

Konsep dasar kerjasama BMG dan POLRI adalah memadukan potensi sumber daya yang dilandasi dengan tugas pokok masing-masing sehingga menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. BMG mempunyai tugas dan kemampuan menyediakan informasi meteorologi dan geofisika, sedangkan POLRI mempunyai tugas melindungi dan mengayomi masyarakat yang memiliki disiplin tinggi dan didukung dengan Prosedur (PROTAP) serta Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang baik serta memiliki fasilitas dan infrastruktur system komunikasi yang terintegrasi dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, Kerjasama BMG dan POLRI dapat dipandang sebagai kerjasama yang ideal.

Dalam kerjasama ini BMG mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan informasi



dan peringatan dini bencana alam meteorologi dan geofisika dan peringatan dini bencana alam meteorologi dan geofisika kepada POLRI melalui saluran komunikasi yang dibangun bersama. Selanjutnya POLRI menyebar luaskan informasi tersebut kepada masyarakat melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Secara singkat informasi dan peringatan dini yang disampaikan dari kantor pusat BMG dikirim ke Mabes POLRI dan kemudian diteruskan ke jajaran POLRI yang ada di daerah seperti POLDA dan POLRES.

Dalam pelaksanaannya, penyebaran informasi yang dilakukan oleh jajaran POLRI di daerah dapat bekerja sama dengan jajaran BMG di daerah seperti Balai Besar Meteorologi dan Geofisika serta stasiun-stasiun meteorology, klimatologi, dan geofisika. Nota kesepakatan ini akan dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disusun bersama dan dilanjutkan dengan Penyusunan Prosedur Tetap untuk keperluan internal masing-masing. Disamping itu akan dilakukan pelatihan - pelatihan untuk mensosialisasikan JUKLAK, PROTAP, dan JUKNIS yang telah disusun.***

Realisasikan, Postur Polri yang Bermoral, Profesional dan Modern sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat



SERAH terima jabatan di lingkungan Polri, hal biasa dan harus dilakukan sebagai suatu kebutuhan organisasi, dalam rangka pembinaan personil Polri baik dalam bentuk *tour of duty* maupun *tour of area*, agar proses regenerasi dan penyegaran dapat terpelihara. Diharapkan Polri dapat terus optimal melak-

sanakan fungsinya dalam bidang perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Penegasan tersebut, disampaikan Kapolri pada acara serah terima beberapa jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri di Rupa-tama, Mabes Polri.

Menurut Kapolri Jenderal Polisi Drs Sutanto, persolan aspek sosial, politik, ekonomi dan pertahanan dan keamanan, telah memberikan beban tugas bagi Polri yang memerlukan pemikiran dan tindakan yang serius, terprogram, profesional dan modern. Strategi Kepolisian yang tepat, harus dikembangkan agar dapat operasional dan menyentuh dasar permasalahan gangguan kamtibmas. Perkembangan dunia yang semakin canggih dan modern, kata Sutanto, tidak saja menimbulkan efek positif bagi kehidupan umat manusia, tetapi juga efek negatif yang seringkali menimbulkan ancaman dan gangguan terhadap keamanan serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Lebih jauh Kapolri menegaskan bahwa strategi Kepolisian yang tepat, harus dikembangkan agar dapat operasional dan menyentuh dasar permasalahan gangguan Kamtibmas. Strategi Perpolisian Masyarakat yang mulai dikembangkan secara aktif melalui tindakan Kepolisian yang mengutamakan tindakan preventif dan preemtif daripada tindakan yang bersifat represif, menuju Polisi Sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Personel Polri tidak hanya dituntut untuk mampu membaca dan menganalisa situasi, tetapi juga harus dapat menjadi stabilisator, dinamisator, motivator serta negosiator keamanan dan ketertiban dalam setiap lingkungan sosialnya untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dapat timbul menjadi gangguan Kamtibmas. Personel Polri dituntut untuk terus menerus beradaptasi dengan dinamika sosial, budaya,



ekonomi dan politik yang berkembang di lingkungan masyarakatnya.

Kapolri menegaskan, Tindakan yang dilakukan harus benar-benar berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan perorangan/kelompok sehingga citra Polri sebagai organisasi yang mandiri dan dipercaya oleh masyarakat dapat terwujud demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu kita semua terdorong untuk selalu berpikir cerdas, cermat, dan mendalam tentang hal apa yang kita lakukan. Menganalisa berbagai masalah, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal, telah menyadarkan pada kita, bahwa tugas Polri ke depan, tidaklah semakin ringan.

Pada setiap kesempatan, hendaknya kita semua selalu mempersiapkan diri, kapanpun dan dimanapun untuk mengantisipasi sedini mungkin, setiap gangguan Kamtibmas yang akan terjadi serta mampu menanganinya secara profesional dan proporsional sehingga keberadaan Polri di tengah masyarakat, benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, upaya menciptakan perasaan aman, tenteram dan adil.

Peran pimpinan dalam organisasi, merupakan faktor yang domi-

nan karena ditangan seorang pemimpin nilai-nilai, norma-norma dan pranata-pranata organisasi dapat hidup dan dijadikan pedoman dalam setiap tindakan. Sehingga, baik buruknya organisasi Polri ditentukan sebagian besar oleh kualitas manusia Polri yang mengawaknya dan titik sentralnya, terletak pada tataran pimpinannya

Kita semua sependapat bahwa jabatan yang diserahterimakan ini adalah tataran pimpinan, top manager posisi yang sangat signifikan, bagi penentuan kinerja dan perkembangan Polri ke depan. Kemampuan sebagai seorang pimpinan yang baik akan diuji. Perhatian yang sangat besar diharapkan, untuk melakukan pengendalian dan pengawasan, secara benar dalam melakukan hal-hal yang benar.

Selain itu, harus dapat membina, membimbing, mengayomi dan melayani masyarakat, sekaligus anggota Polrinya sebagai pelaksana tugas di lapangan. Keteladanan untuk melakukan hal-hal yang baik, dengan kualitas terbaik, sangatlah dituntut. terkait dengan posisi yang diemban, merupakan sebagai amanah dan kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan tentang kualitas diri bahwa mampu untuk melaksanakan jabatan dengan baik. Namun, jabatan

tersebut mengandung keonsekuensi pertanggungjawaban yang besar, tidak saja kepada keluarga, masyarakat, ataupun hukum, juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mengetahui apa yang kita pikirkan dan lakukan.

Polri saat ini terus-menerus berupaya mereformasi diri, melakukan perubahan dengan harapan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Yang perlu dipegang dan realisasikan, "terwujudnya postur Polri yang bermoral, profesional dan modern, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakan hukum". Untuk mencapai hal tersebut, memang tidaklah mudah. Berbagai keterbatasan sumber daya organisasi dan perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, merupakan persoalan yang harus dipikirkan guna menemukan pola tindak, dalam menentukan langkah ke depan. Namun, kita semua yakin dan percaya, bahwa untuk memegang jabatan di lingkungan Polri, dapat melaksanakannya dengan baik.

Kapolri mengingatkan kepada pejabat baru, Irwasum Polri dan Kadiv Propam Polri karena memegang posisi yang sangat penting, agar dilakukan upaya meniadakan penyimpangan yang terjadi di tubuh Polri. Dalam menjalankan tugas ini, dapat proaktif tidak hanya sekedar menunggu laporan maupun pengaduan. Tetapi, benar-benar mengawal setiap pergerakan langkah organisasi Polri, agar tetap on the tack, pesannya. Perlu dilakukan upaya-upaya yang secara terkoordinasi dengan satuan-satuan yang ada di tubuh Polri, harus dikembangkan dengan memberikan pemahaman dan pengawasn sejak aspek perencanaan, sehingga potensi penyimpangan yang ada dapat diminimalkan. Dengan pola ini, penyimpangan yang terjadi dan mungkin akan terjadi dapat ditemukan dan tidak meluas menjadi masalah yang besar dan berkepanjangan.**